

HANTU PKI DAN UJUNG REKONSILIASI

**(Analisis Framing Pemberitaan PKI Era Presiden Abdurrahman Wahid dan
Joko Widodo pada Majalah *Tempo* dan *Gatra*)**



NASKAH PUBLIKASI

**Disarikan dari Skripsi yang Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Sosial pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas
Islam Indonesia**

Oleh

Meigitaria Sanita

NIM. 14321109

Puji Rianto

NIDN. 0503057601

Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

2018

Naskah Publikasi

HANTU PKI DAN UJUNG REKONSILIASI
(Analisis Framing Pemberitaan PKI Era Presiden Abdurrahman Wahid dan
Joko Widodo pada Majalah *Tempo* dan *Gatra*)

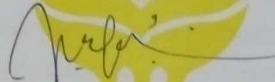
Disusun Oleh

Meigitaria Sanita
14321109

25 MAY 2018

Telah disahkan dosen pembimbing skripsi pada

Dosen Pembimbing Skripsi,



Puji Rianto., S.IP., M.A.

NIDN: 0503057601

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA

NIDN: 0516087901

HANTU PKI DAN UJUNG REKONSILIASI

(Analisis Framing Pemberitaan PKI Era Presiden Abdurrahman Wahid dan Joko Widodo pada Majalah Tempo dan Gatra)

Oleh Meigitaria Sanita

Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB menyelesaikan studi tahun 2018

Puji Rianto

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII

Abstrak

Pemberitaan isu kebangkitan PKI dan upaya rekonsiliasi selalu muncul setiap tahun dimedia massa. Pro dan kontra selalu timbul sebagai reaksi publik mengingat propaganda Orde Baru mengenai PKI adalah musuh Negara dan partai terlarang. Tulisan ini menjelaskan bagaimana konstruksi dan framing media Tempo dan Gatra dalam menanggapi isu kebangkitan PKI dan rekonsiliasi pada keluarga mantan PKI dan korban dari ketidakadilan secara HAM dan Hukum. Pemilihan objek berita difokuskan berdasarkan masa kepemimpinan presiden tertentu. Dalam hal ini era presiden Gus Dur dan Jokowi. Pertimbangan pemilihan karena fenomena yang terjadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Gus Dur memiliki usulan kebijakan bersebrangan dalam memandang sejarah PKI terkait ketetapan MPRS no 25 tahun 1966 dengan alasan keadilan dan hak asasi manusia dan rekonsiliasi, sedangkan pada era Jokowi munculnya upaya rekonsiliasi forum 65 melalui diskusi pelurusan sejarah hingga muncul reaksi dari pihak TNI AD yang menayangkan ulang film Pengkhianatan G30S/PKI. Sedangkan pemilihan media berdasarkan keekatan sejarah diantara kedua media. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing Enmant untuk mengetahui tawaran solusi dan sikap media dalam menanggapi isu PKI. Dalam tulisan ini Tempo cenderung

berpihak kepada korban PKI dan mendukung upaya rekonsiliasi serta menganggap bahwa PKI sengaja dihantukan Orde Baru. Sedangkan Gatra cenderung berimbang dan memandang sejarah PKI menjadi traumatik sejarah pada masyarakat, sehingga sikap Gatra adalah rekonsiliasi dilakukan secara alami.

Key words: PKI, Analisis Framing, Konstruksi, Rekonsiliasi

ABSTRACT

Meigitaria Sanita. 14321109. PKI GHOST AND THE END OF RECONCILIATION (Framing Analysis On The News PKI Era President Abdurrahman Wahid and Joko Widodo On Magazine Tempo and Gatra). Undergraduate Thesis. Program Study of Communication Faculty of Psychology and Social Culture, Islamic University of Indonesia. 2018

News of PKI awakening and reconciliation efforts always appear every year in the mass media. Pros and cons always arise as a public reaction, given the propaganda of the Orde Baru of the PKI is the enemy of the state and the forbidden party. This research explains how the construction and framing of media tempo and gatra in response to the issue of the revival of the PKI and reconciliation was the family of former PKI and victims of justice by human rights and law. The selection of a news object focused on a certain presidential term of leadership. In this case the era of president Gus Dur and Jokowi. Election consideration because the phenomenon that occurs is different from previous years. Gus Dur had an opposite policy proposal in view of the PKI's history of MPRS Decree No. 25 of 1966 on grounds of justice and human rights and reconciliation. while in the era of Jokowi the emergence of forum reconciliation efforts 65 through the discussion of history alignment until the reaction came from the army that repeated the film Pengkhianatan G30S / PKI. While the media selection based on historical closeness between the two media. This research uses Enmant framing analysis method to find out the solution offer and the attitude of media in responding to PKI issue. In this paper Tempo tended to side with the PKI victims and support the reconciliation efforts and assume that the PKI was deliberately conjoined the New Order. While Gatra tend to be balanced and look at the history of the PKI became traumatic history on society, so the attitude Gatra is reconciliation done naturally.

Keywords: PKI, Framing Analysis, Construction, Reconsiliatio

A. Pendahuluan

Ketika Abdurrahman Wahid menjadi presiden Indonesia salah satu kebijakan yang menghebohkan beberapa kalangan adalah rencana Gus Dur (sapaan presiden Abdurrahman Wahid) untuk mencabut TAP MPR no 25 tahun 1966 tentang PKI walaupun kebijakannya dinilai kontroversi dan terkesan membela PKI oleh berbagai pihak. Gus Dur meyakini bahwa rencananya sesuai dengan undang-undang Dasar 1945.¹

Selain menguat isu PKI dimasa kepemimpinan Gus Dur, PKI juga hangat dibicarakan ketika kepemimpinan Jokowi (panggilan akrab presiden Joko Widodo). Oktober 2017 isu PKI menguat kembali karena keinginan forum 65 untuk melakukan diskusi pelurusan sejarah yang ditentang oleh pihak anti komunis hingga muncul reaksi dari TNI AD untuk menginstruksikan memutar ulang film Pengkhianatan G30S/PKI yang telah berhenti tayang sejak 1998 dengan alasan untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang sejarah pahit bangsa Indonesia.

Berdasarkan fenomena tersebut tulisan ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana media mengkonstruksikan PKI dengan berbagai pertimbangan kebijakan dan latar belakang media. Hal tersebut terjadi karena posisi media dan jurnalis sebagai agen konstruksi dan mendefinisikan realitas. Realitas pada sebuah berita dibentuk dan dikonstruksikan melalui pendekatan framing, mengenai aspek-aspek yang akan ditonjolkan dalam sebuah berita.²

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana PKI dikonstruksikan oleh media, dan mencoba mencari tau kebenaran atas justifikasi yang selama ini dipropagandakan Orde Baru bahwa PKI adalah musuh Negara. Sehingga publik menilai bagaimana pengaruh kepentingan politik terhadap pemberitaan PKI. Sehingga masyarakat lebih bijak memaknai pemberitaan khususnya dalam ranah fenomena politik serta bagaimana berfikir lebih luas dengan isu PKI yang begitu sensitif untuk masyarakat Indonesia. Alasan pemilihan pemberitaan PKI sebagai objek analisis karena beberapa faktor. Pertama berita PKI selalu muncul setiap tahun dan selalu menjadi kegelisahan

¹ Tim Penulis Kick Andy, *Kumpulan Kisah Inspiratif 2*, (Yogyakarta: Bentang, 2011), hal. 162

² Eryanto, *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, (Yogyakarta: Penerbit LKis 2002), hal 66

yang sama oleh publik. Kedua, berita PKI seringkali dianggap sebagai isu perpecahan mengiringi pergantian pemimpin. Ketiga, upaya rekonsiliasi yang diajukan oleh mantan keluarga korban PKI yang menuntut keadilan namun tidak kunjung terealisasi. Pertimbangan pemilihan media *Tempo* dan *Gatra* karena kedua majalah tersebut mempunyai kredibilitas dalam pemberitaan isu politik. Selain itu mengenai sejarah berdirinya *Gatra* yang tak lepas dari faktor politik. *Gatra* terbit pada tahun 1994 dan terbit setiap minggu, *Gatra* berdiri karena adanya sebuah polemik yang cukup kontroversi yaitu pembredelan majalah *Tempo* oleh pemerintahan orde baru. Selain itu majalah *Tempo* dan *Gatra* dianggap cukup seimbang dari segi durasi penerbitan serta kemiripan rubrik yang sama-sama sering membahas mengenai pemberitaan politik.

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian lain yang memiliki kesamaan tema adalah jurnal yang ditulis oleh Dede Supriyatno dan Adolfo Eko Setyanto Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret dengan judul “*Representasi Citra militer Dalam Pemberitaan Majalah Tempo (Analisis Wacana Citra Militer Pada Pemberitaan Majalah Tempo Liputan Khusus Pengakuan Algojo 1965 Edisi 1-7 Oktober 2012)*”. Fokus dalam penulisan jurnal tersebut adalah citra militer di level teks dengan menggunakan metode analisis wacana model Teun A. Van Dijk. Hasil dari penulisan jurnal tersebut adalah citra militer saat itu sangat buruk karena militer dianggap kejam atas perannya yaitu fasilitator dan algojo pembantaian terbukti dengan tindakan yang menyebarkan propaganda negatif dan menciptakan mekanisme pembantaian mengenai pihak yang tertuduh menjadi anggota PKI.³

Selanjutnya Jurnal *International Memory studies* dari ETD UGM. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisis framing pada media *Tempo* yaitu untuk mengetahui pergeseran konstruksi pada berita retropektif dan reformasi. Mengingat bahwa PKI dan komunisme memiliki stigma negatif melalui berbagai strategi politik budaya. Fokus pada penelitian ini adalah analisis teks berita retropektif majalah *Tempo*

³ Dede Supriyatno dan Adolfo Eko Setyanto, Jurnal Universitas Sebelas Maret. “*Representasi Citra militer Dalam Pemberitaan Majalah Tempo (Analisis Wacana Citra Militer Pada Pemberitaan Majalah Tempo Liputan Khusus Pengakuan Algojo 1965 Edisi 1-7 Oktober 2012)*” Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

pada orde baru dan reformasi. Hasil dari penelitian tersebut menggambarkan konstruksi ideologi dan frame mengenai peristiwa 1965 hingga 1966 tentang hukuman tanpa pengadilan bagi kelompok yang dituduh sebagai simpatisan ataupun anggota PKI saat itu. Teori yang digunakan adalah memori kolektif, teori media dan jurnalisme, teori hegemoni ideology dan framing media.⁴

Selanjutnya jurnal Social Science Vol , No 3 2013 yang ditulis Oleh Baabe, Aspen Raemano dkk Universitas Negeri Manado yang berjudul “*Keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI) Dalam Pemerintahan Hasil Pemilu Pertama 1955-1959*” penelitian tersebut menjelaskan mengenai sistem politik yang dianut bangsa Indonesia diawal kemerdekaan, sistem dasar pembentukan partai salah satunya partai komunis di indonesiaserta bagaimana keterlibatan PKI pada penyelenggaraan pemerintahan tahun 1955. Hasil penelitian tersebut adalah sistem politik yang dianut terlihat pada kebijakan yang diterapkan presiden Soekarno yang bersifat dominan. Pemimpin besar revolusi merupakan perwujudan dari sila keempat maka muncullah masa demokrasi terpimpin. Pada saat itu PKI memiliki peran politik yaitu mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologi nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia tahun1955.⁵

Terakhir adalah jurnal Historia, jurnal Pendidikan sejarah No.1 tahun 2000 hal 62-71 yang ditulis oleh Andi Suwirta “*Mengkritisi Peristiwa G30S 1965: Dominasi Wacana Sejarah Orde Baru Dalam Sorotan*” tulisan tersebut membahas bagaimana penulisan sejarah di Indonesia kontemporer khususnya orde baru yaitu 1968 hingga 1998 cenderung didominasi penguasa Negara. Pada penulisan jurnal tersebut membahas mengenai peristiwa sejarah Indonesia yang kontroversi yaitu peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S 1965. Hal ini dianggap penting karena beberapa dokumen penting dan rahasia mengenai G30S 1965 belum terbuka bagi siapa saja yang memaknai

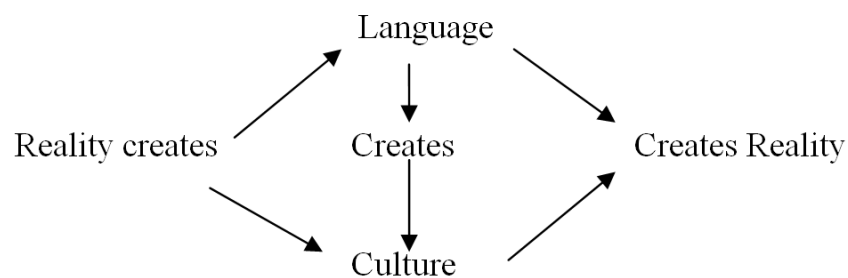
⁴ Jurnal International Memory studies dari ETD UGM, etd.repository.ugm.ac.id diakses pada 15 Mei 2017

⁵ Baabe, Aspen Raemano dkk, “*Keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI) Dalam Pemerintahan Hasil Pemilu Pertama 1955-1959*” Jurnal Social Science Vol , No 3 2013, Universitas Negeri Manado.

dan memahami peristiwa sesuai dengan cara pandangnya.⁶ Pembahasan cukup panjang dalam sub judul mengenai *Versi Dominan dan versi Tandingan* pertama mengenai pemikiran yang seragam dalam pemaknaan peristiwa G30S 1965.

Beberapa teori yang mendukung adalah konstruksi realitas sosial, ideologi media, dan framing. Peter Berger dan Luckman memperkenalkan gagasan konstruksi realitas sosial dalam bukunya yang berjudul *The Social Construction of Reality*, menyatakan bahwa pemahaman manusia terhadap sesuatu terjadi karena adanya komunikasi yang tercipta antara manusia itu sendiri dengan yang lain karena proses sosial digambarkan melalui perilaku dan tindakan serta interaksi.⁷ Konstruksi realitas prinsipnya adalah konseptualisasi dari sebuah peristiwa ataupun keadaan yang berkaitan dengan politik. Faktanya pekerjaan media adalah menceritakan peristiwa sehingga kesibukan dari media tentu saja mengkonstruksi berbagai realitas yang diliput dan kemudian disiarkan. Realitas yang dikonstruksi disusun hingga terbentuk sebuah cerita dan wacana bermakna.⁸ Bahasa menjadi unsur utama dalam proses konstruksi realitas karena bahasa menjadi instrument yang digunakan untuk menceritakan sebuah realitas.⁹

**Berikut Hubungan Antara Bahasa, Realitas Dan Budaya
(Christian and Christian, 1996)¹⁰**



⁶ Andi Suwarta, *Mengkritisi Peristiwa G30S 1965: Dominasi Wacana sejarah Orde Baru Dalam Sorotan*, Jurnal Historia: jurnal Pendidikan Sejarah, No.1 tahun 2000 Hal .62-71

⁷ Burhan Bungin, 2008 13

⁸ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, (Penerbit Granit, Jakarta: 2004), 11

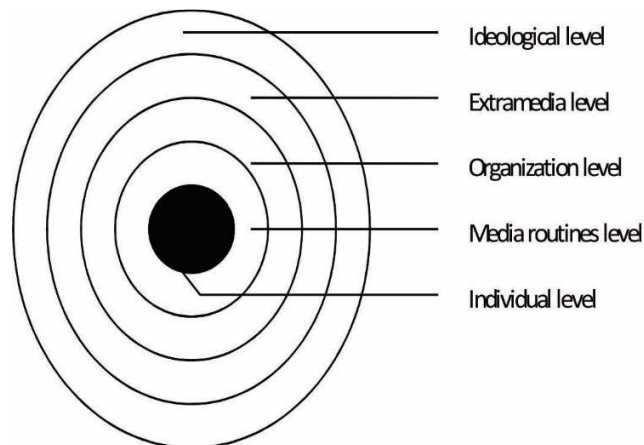
⁹ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, (Penerbit Granit, Jakarta: 2004), hal 12

¹⁰ Ibid. 13

Selanjutnya, Ideologi media Shoemaker dan Reese memandang ideologi sebagai faktor yang memberikan pengaruh pada isi media karena ideologi sebagai mekanisme simbolik yang memiliki kekuatan mengikat masyarakat. Ideologi menekankan pada siapa yang memiliki kepentingan dan bagaimana rutinitas organisasi media tersebut berjalan.¹¹ Dengan demikian media merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan dan kekuatan dilingkungan masyarakat.¹²

Konsep yang disampaikan Shoemaker dan Reese disebut dengan *Hierarchy of influence* konsep tersebut menjelaskan lapisan-lapisan yang mempengaruhi isi media. Gambarnya sebagai berikut:¹³

“Hierarchy Of Influence” Shoemaker & Reese



Media massa tidak akan bisa dipisahkan dengan kepentingan dengan kelompok yang berada dibelakangnya, terutama dalam hal transformasi isi informasi. Kepentingan yang menjadi acuan utama adalah ekonomi dan kekuasaan.¹⁴

¹¹Shoemaker dan Reese, *Mediating The Message: Theories Of Influence On Mass Media Content*, (New York: Longman Publisher, 1996), hal. 223

¹² Ibid, 229

¹³ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Analisis Framing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), Hal.138

¹⁴Mahpuddin. 2009. *Ideologi Media Massa dan Pengembangan Civil*. *Jurnal Academica Untad*. Vol 1, No 2. <http://download.portalgaruda.org/article.php> 191

Selanjutnya jurnalisme sastra, diasumsikan sebagai penulisan dengan gaya feature yang tidak kaku dan mendalam. Tipe feature yang mengangkat sisi human interest dan kaya warna cerita dianggap sebagai awal dari munculnya jurnalisme sastra.¹⁵ Namun banyak yang beranggapan bahwa jurnalisme sastra berbeda dengan feature. Laporan feature biasanya berita soft news sedangkan jurnalisme sastra adalah hasil dari laporan hard news yang dikemas dengan narasi.¹⁶

Buku *Jurnalisme Sastrawi (Antologi Liputan Mendalam dan Memikat)* yang dituliskan oleh Andreas Harsono dalam pengantarnya menjelaskan bahwa jurnalisme sastra bukan sebuah reportase yang ditulis secara puitis namun lebih menjelaskan secara mendetail fakta kedalam narasi.¹⁷ Ada beberapa unsur penting dalam narasi tersebut antara lain fakta, konflik, karakter, akses, perjalanan waktu, unsur kebaruan.¹⁸ Mengenai perkembangannya di Indonesia, yang telah menerapkan jrnalisme sastra adalah majalah Tempo, Gatra dan Pantau yang ada dibawah ISAI.¹⁹

Terakhir adalah framing, Pada penelitian ini peneliti, akan menggunakan framing model Robert N. Entman. Framing model Entman menjelaskan mengenai dua dimensi besar dalam teks yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas isu. Kedua dimensi tersebut menegaskan pemahaman bahwa framing model Entman penulisan berita didasarkan pada perspektif wartawan dalam menyeleksi isu. Dari perspektif tersebut ditentukan fakta yang dipilih dan bagian yang perlu ditonjolkan ataupun dihilangkan.²⁰

¹⁵ Nurul Khomariah, Roekhan, dkk , *Penggunaan Unsur Fiksi Dalam Buku Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan mendalam dan Memikat*, jurnal-online.um.ac.id (Diakses 28 Mei 2018)

¹⁶ Shanaz Asnawi Yusuf, *Konstruksi Konflik dalam Jurnalisme Sastrawi*, portalgaruda.org (Diakses, 28 Mei 2018)

¹⁷ Andreas Harsono, *Jurnalisme Sastrawi (Antologi Liputan Mendalam dan Memikat)*, (Jakarta: Kepustakaan Gramedia Populer, 2008), hal.xii

¹⁸ Ibid xiii

¹⁹ Ibid, ix

²⁰ Ibid

C. Metode Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah berita yang berkaitan dengan PKI pada majalah *Tempo* dan majalah *Gatra* yang dibagi menjadi dua yaitu periode masa kepemimpinan presiden Gus Dur terhitung dari terbitan tanggal 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Pemerintahan presiden Jokowi, terhitung dari terbitan tanggal 20 Oktober 2014 hingga Oktober 2017. Dari banyaknya pemberitaan isu PKI pada kedua era kepresidenan tersebut dipilih isu yang dianggap mempengaruhi sistem pemerintahan. pemberitaan yang terbit sepanjang bulan April tahun 2000 mengenai usulan Gus Dur untuk mencabut TAP MPRS No 25 Tahun 1966. Sedangkan pada era kepresidenan Jokowi yaitu pemberitaan yang terbit pada bulan Oktober 2017, yaitu aksi pembubaran diskusi pelurusan sejarah 1965-1966 oleh forum 65 yang akhirnya muncul reaksi dari TNI AD untuk memutar ulang film Pengkhianatan G30S PKI.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menganalisis data primer dengan analisis model framing model Robert N. Entman, dalam model ini terdapat dua dimensi penting yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek.

Seleksi Isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung didalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (include), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan (exclude). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.
Penonjolan Aspek	Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari isu tertentu dari suatu peristiwa atau isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

Dari kedua dimensi tersebut analisis framing model Entman mengacu pada empat hal yaitu pemberian definisi, sumber masalah, serta evaluasi dan rekomendasi suatu wacana dan menekankan kerangka berpikir terhadap suatu peristiwa serta membuat keputusan moral.

Konsep Framing Robert N. Entman

<i>Define Problem</i>	Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat? Sebagai apa?
-----------------------	--

(Pendefinisian Masalah)	Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

D. Hasil dan Pembahasan

Framing pada Majalah Tempo

Empat hasil konstruksi yang ditemukan melalui metode analisis framing model Entman pada *Tempo* dalam memandang isu PKI pada kedua era kepresidenan tersebut antara lain pelarangan penyebaran ideologi yang tidak relevan dengan zaman, kemunculan isu komunisme untuk menyerang presiden, penyebab masyarakat ketakutan dengan PKI adalah propaganda Orde Baru dan TNI AD, dan terakhir pelanggaran HAM dan sikap mendukung rekonsiliasi untuk pelurusan sejarah. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pengaruh latar belakang dan ideologi *Tempo*.

Pelarangan mempelajari dan mencari tahu ideologi komunisme dipandang *Tempo* sebagai tindakan yang sangat tidak relevan dengan zaman. *Tempo* selalu menunjukkan fakta-fakta mengenai ideologi komunisme sudah tidak berkembang lagi karena sudah tidak laku lagi. Pada era kepresidenan Gus Dur terdapat sikap yang sama ditunjukkan oleh *Tempo* yaitu pada berita “*Melarang Marxisme-Leninisme itu Buat Apa, Bung?*” argumen *Tempo* sangat jelas yaitu mengenai kebebasan dalam mengakses informasi. Sama halnya dengan berita “*Kue Pahit Untuk Jokowi*” yang diterbitkan pada era kepresidenan Jokowi. Dalam berita tersebut penyebab dari kerusuhan yang terjadi karena pihak yang terprovokasi karena ketakutan bahwa ideologi komunis akan tersebar. Konstruksi yang diciptakan *Tempo* menyampaikan makna kepada publik bahwa keadaan Indonesia yang sama sekali bukan berideologi komunis seharusnya tidak perlu dipermasalahkan dan tidak perlu ditakutkan. *Tempo* ingin mengajak publik untuk melihat

keadaan Indonesia saat ini, bagaimana ideologi komunisme sudah tidak mampu lagi mendapatkan dukungan. Sehingga melarangpun sepertinya memang sudah tidak ada gunanya.

Kemunculan isu komunisme digunakan untuk menyerang presiden. Isu PKI yang selalu muncul disetiap tahun digambarkan *Tempo* sebagai tindakan untuk menyerang presiden disetiap periodenya. Sesuai dengan tujuan Gus Dur saat itu yaitu penyetaraan hak asasi pada mantan keluarga PKI dan masyarakat yang tertuduh sebagai anggota PKI. Namun, tindakan tersebut nyatanya menuai kontroversi dan malah menjatuhkan Gus Dur. Hal tersebut ditunjukkan oleh *Tempo* atas rencana Gus Dur yang memperoleh banyak penolakan dan seolah tidak tepat. Seperti yang disampaikan oleh Pramodya Ananta Toer mengenai penolakan permintaan maaf Gus Dur. Serta pihak-pihak lain yang meremehkan rencana Gus Dur. Sehingga yang terjadi dimasyarakat adalah tidak lagi mempercayai Gus Dur. Sedangkan pada Era Jokowi opini yang berjudul “*Hantu PKI Dan Politik Elektoral 2019*” tulisan tersebut merupakan hasil dari sikap redaksi *Tempo* yang menyatakan bahwa kemunculan isu PKI sebagai kepentingan politik menyambut pemilu 2019. Pemilihan kata “*Hantu*” sebenarnya lebih mengacu pada sebuah objek yang seringkali ditakuti oleh masyarakat, namun selayaknya hantu komunisme sebenarnya juga tidak berwujud. Mengingat beberapa kali *Tempo* sering menyebutkan bahwa PKI telah dihantukan oleh Orde Baru. Dalam penggunaan bahasa tentu saja akan berimplikasi terhadap bentuk konstruksi realitas serta makna yang ada didalamnya.²¹ Disitu juga dijelaskan bahwa munculnya isu PKI untuk melorotkan pamor Jokowi, pola tersebut mirip pada tahun 2014 atas tuduhan Jokowi berasal dari keluarga PKI. Sehingga tujuannya untuk menyerang Jokowi dan mengalahkan pemilu 2019.

Orde Baru dan TNI AD aktor yang menyebabkan masyarakat takut dengan isu PKI. *Tempo* selalu menyebut PKI sengaja *dihantukan* yang dibuat oleh Orde Baru dengan tujuan menakuti masyarakat. Pada era kepresidenan Gus Dur, “*Melarang Marxisme-Leninisme itu Buat Apa, Bung?*” disebutkan bahwa Orde Baru yang sengaja membuat PKI dan komunisme menjadi hal yang misterius. Selain itu berita dengan judul “*PKI, Hantu atau Dihantukan?*” yang membahas mengenai pro kontra usulan Gus Dur

²¹ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, (Penerbit Granit, Jakarta: 2004), hal. 13

mencabut TAP MPRS no 25 Tahun 1966, *Tempo* menjelaskan bahwa sumber permasalahannya adalah Orde Baru yang mengkampanyekan antikomunis sehingga masyarakat menolak usulan Gus Dur. pada era kepresidenan Jokowi berita “*Hantu PKI dan Politik Elektoral 2019*” merupakan sikap yang ditunjukkan *Tempo* bahwa dibalik penyerangan yang dilakukan pihak demonstran adalah purnawirawan jenderal. Selanjutnya berita yang berjudul, “*Perintah Panglima, Mau Apa?*” merupakan bukti bahwa TNI AD memiliki kekuasaan atas diputarnya kembali film *Pengkhianatan G30S PKI*. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali pada masyarakat agar yakin bahwa PKI seperti yang mereka propagandakan pada masa Orde Baru.

Pelanggaran HAM dan perlunya Rekonsiliasi untuk pelurusan sejarah. Wacana yang dibangun oleh *Tempo* tentunya sesuai dengan ideologi yang dianut *Tempo*, meskipun pihak *Tempo* tidak mengatakan bahwa mereka mengklaim hal tersebut sebagai ideologi namun yang terjadi muncul pada berita yang disampaikan. Sesuai yang disampaikan Bagja, PKI pada orde baru adalah pihak yang ditindas diadili tanpa alasan, disini *Tempo* membela PKI dalam hak hidup, hak kebebasan dan setara dengan yang lain. Berdasarkan berita yang diterbitkan *Tempo* pada era kepresidenan Gus Dur pada semua judul memberikan tawaran solusi untuk mendukung rencana Gus Dur mencabut TAP MPRS no 25 Tahun 1966 dan tercapainya rekonsiliasi. Hal tersebut ditunjukkan pada berita yang berjudul “*Melarang Marxisme-Leninisme itu Buat Apa, Bung?*” disebutkan dengan jelas bahwa *Tempo* menyebutkan agar TAP MPRS tersebut dicabut. Selanjutnya, “*PKI, Hantu atau Dihantukan?*” dalam paragraf terakhir *Tempo* menyebutkan bahwa tragedi G30S menciptakan luka yang tak tersembuhkan dan berbagai hujatan maka perlu dilakukan rekonsiliasi untuk masa depan yang lebih baik. Terakhir, “*Islam, Maaf dan PKI*” tulisan Ahmad Sahal yang menjelaskan sejarah masa lalu antara Islam dan PKI. Sedangkan Era Jokowi Jokowi sikap *Tempo* dalam memandang pembubaran diskusi 1965-1966 dan reaksi TNI AD yang memutar ulang film *Pengkhianatan G30S PKI* adalah tetap memihak pada pihak yang akan melakukan diskusi. Pada berita yang berjudul “*Perintah Panglima, Mau Apa?*” *Tempo* memberikan rekomendasi agar tetap dilaksanakan diskusi pelurusan sejarah 1965-1966.

Framing pada Majalah Gatra

Hasil konstruksi yang dibangun *Gatra* dalam memaparkan isu kebangkitan PKI pada era kepresidenan Gus Dur dan Jokowi terdapat empat bahasan pokok antara lain perlunya mempertimbangkan pembebasan ideologi komunisme dengan pertimbangan sejarah dan ketidakcocokan dengan ideologi bangsa, komunisme sebagai alat untuk melemahkan pemerintah dan mobilisasi politik, TNI AD sosok yang menjaga keamanan Negara, Rekonsiliasi alami dan pemeriksaan sejarah.

Pembebasan ideologi komunisme perlu dipertimbangkan karena traumatik sejarah dan tidak sesuai dengan ideologi bangsa. Pesan yang disampaikan *Gatra* mengenai pemberitaan usulan Gus Dur mencabut TAP MPRS no 25 Tahun 1966 pada berita "*Dagang Politik Palu Arit*" disampaikan bahwa PKI telah menjadi sejarah pahit di Indonesia. Sedangkan berita yang diterbitkan pada era kepresidenan Jokowi menanggapi isu PKI yang merebak karena adanya seminar yang dilakukan forum 65 dan dibubarkan oleh pihak polisi atas desakan pendemo yang tidak setuju dengan adanya kegiatan tersebut hingga diputarnya film *Pengkhianatan G30S PKI* oleh TNI AD disampaikan *Gatra* bahwa ideologi komunisme tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia. dua berita yang menyatakan bahwa ideologi komunisme perlu dipertimbangkan. "*Peristiwa 1948: Belanda dari Depan, PKI Tusuk dari Belakang*" merupakan judul yang diangkat *Gatra* untuk disampaikan kepada publik bahwa PKI tidak mendukung terbentuknya NKRI. Namun walaupun demikian *Gatra* cukup bijak menanggapi fakta tersebut dengan mengatakan perlunya pemeriksaan sejarah. Berita selanjutnya "*Bola Panas Isu PKI*" yang menegaskan bahwa ideologi yang tepat adalah pancasila. *Gatra* ingin menyampaikan bahwa pembebasan ideologi komunisme perlu dipertimbangkan karena faktor traumatik sejarah.

Isu komunisme sebagai alat untuk melemahkan pemerintah dan mobilisasi politik. Disebutkan *Gatra* pada berita yang berjudul "*Dagang Politik Palu Arit*" berdasarkan penonjolan yang dilakukan *Gatra* alasan yang menjadikan kemarahan publik adalah usulan Gus Dur dianggap tidak menjadi solusi yang dapat menyelesaikan masalah. Hal itulah yang menyebabkan posisi Gus Dur semakin melemah dipemerintahan. Selanjutnya "*Asap Tanpa Api*" yang menunjukkan persaingan politik pada partai politik saat itu yang diserang karena kecenderungan ideologi tertentu. Era Jokowi isu PKI digunakan sebagai alat mobilisasi politik. Berdasarkan pemberitaan yang diterbitkan *Gatra* "*Bola Panas isu*

PKI” berita tersebut membahas mengenai reaksi TNI AD atas munculnya isu penyebaran ideologi komunis oleh forum 65. Akibat dari isu tersebut TNI AD memberikan kejutan untuk masyarakat yaitu memutar ulang film Pengkhianatan G30S PKI. dari momen pemutaran film tersebut dimanfaatkan oleh berbagai partai politik melalui dukungan yang diberikan. Diantaranya PAN, PKS, PKB, Golkar. Dukungan yang mungkin paling mencolok adalah dari Golkar, yaitu dengan memberikan ruang untuk menyiarkan di stasiun TVOne, yang kita tahu Aburizal bakrie pemiliknya adalah Ketua Dewan Pembina Golkar.

TNI AD sebagai pelindung Negara dari bahaya komunisme. Berita yang disampaikan *Gatra* mengidentifikasi bahwa TNI AD adalah pihak yang mampu melindungi kekacauan pada saat itu karena mampu melawan PKI. Berdasarkan berita yang diturunkan *Gatra* pada era kepresidenan Jokowi berita yang menyebutkan bahwa TNI AD sebagai pihak yang mampu melindungi Negara dan berhasil melawan PKI. “*Peristiwa 1948: Belanda dari Depan, PKI Tusuk dari Belakang*” judul tersebut menjelaskan bagaimana TNI pada saat itu melawan dua pihak sekaligus yaitu Belanda dan PKI. Namun, yang lebih ditonjolkan oleh *Gatra* adalah perlawanan yang dilakukan TNI AD terhadap PKI. TNI AD berhasil melumpuhkan PKI yang akan melakukan penyerangan di Madiun tahun 1948. Selanjutnya berita “*Bola Panas Isu PKI*” yang menonjolkan bagaimana tindakan TNI AD dengan kemunculan isu PKI. pada berita tersebut dijelaskan bahwa keputusan TNI AD memutar ulang film Pengkhianatan G30S PKI mendapat respon yang luar biasa dari berbagai lapisan masyarakat. Berdasarkan keberhasilan TNI AD mengumpulkan massa untuk melakukan nobar film Pengkhianatan G30S PKI merupakan upaya yang untuk mengingatkan kepada masyarakat bagaimana bahaya komunisme. Sehingga masyarakat sadar apa untuk saling menjaga ketentraman Negara.

Rekonsiliasi alami dan pemeriksaan ulang sejarah. Berdasarkan berita yang diterbitkan *Gatra* yaitu “*Ujung Jalan Rekonsiliasi Isu PKI*” berita tersebut membahas mengenai kecilnya kemungkinan akan tercapainya rekonsiliasi di Indonesia soal sejarah 1965. Untuk itu *Gatra* memberikan tawaran mengenai rekonsiliasi alami yang artinya keikhlasan dari kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan mengakui kesalahan, bukan menjustifikasi salah satu pihak yang dianggap salah harus meminta maaf kepada

yang benar. Namun, pemeriksaan ulang sejarah tetap harus dilakukan mengingat kebenaran sejarah 1965 selalu menjadi perdebatan pada masyarakat, persoalan tersebut juga dibahas *Gatra* pada berita yang berjudul “*Peristiwa 1948: Belanda dari Depan, PKI Tusuk dari Belakang*”.

Perbedaan Framing Tempo dan Gatra

Frame *Tempo* dan *Gatra* dalam pemberitaan isu PKI era kepresidenan Gus Dur dan era kepresidenan Jokowi akan memunculkan pemaknaan yang berbeda dari setiap fakta pada fenomena tersebut.

Elemen	Tempo	Gatra
Define Problem	Ideologi komunisme tidak sesuai dengan jaman	Komunisme menjadi traumatik sejarah
Diagnose Cause	Orde Baru dan TNI AD	Sejarah PKI
Moral Judgement	a. Isu PKI sebagai alat untuk menyerang presiden b. Pelanggaran HAM	a. Isu PKI melemahkan presiden b. Alat mobilisasi politik
Treatment Recommendation	a. Rekonsiliasi b. Pelurusan sejarah	a. Rekonsiliasi alami b. Pemeriksaan ulang sejarah

Define problem. *Tempo* melihat bahwa komunisme sebagai ideologi yang dianggap sudah tidak selayaknya diperdebatkan karena beberapa fakta yang telah dipaparkan sebelumnya. *Tempo* konsisten dalam memandang isu PKI yang dianggap sensitif oleh masyarakat. Implikasinya terhadap pemberitaan *Tempo* adalah memilih frame bahwa melarang ideologi komunisme bukan tindakan yang perlu dilakukan. Melihat latar belakang *Tempo* yang didirikan oleh Goenawan Momahamad dan kawan-kawan yang notabennya adalah aktivis dimasa itu tentunya sangat paham bagaimana PKI berkembang di Indonesia. Dasar ideologi yang demikianlah mengapa *Tempo* bersikap dan mendukung pembebasan ideologi komunisme di Indonesia sebagai ilmu pengetahuan.

Gatra lebih mengarah pada bagaimana sejarah PKI menjadi sebuah trauma mendalam masyarakat Indonesia. Penggambaran demikian merupakan cara *Gatra* untuk tidak memihak keduanya. Cara tersebut merupakan cara yang cukup aman diterima oleh publik mengingat bahwa isu ini masih saja sensitif dan menuai pro kontra. Latar belakang masa lalu pendirian *Gatra* merupakan akibat dari pembubaran *Tempo* yang dianggap

mengganggu stabilitas ketahanan nasional oleh Orde Baru. Dan pendiri yang masuk kedalam tubuh Gatra merupakan mantan anggota *Tempo*.²²

Diagnose cause. Orde Baru dan TNI AD disebut *Tempo* sebagai pihak yang memberi pengaruh kepada masyarakat untuk tetap merasa takut terhadap komunisme. Ada alasan mendasar terkait dengan latar belakang *Tempo* mengapa melakukan hal demikian. Berdirinya *Tempo* memang pada saat Orde Baru berkuasa, disebutkan bahwa Orde Baru memberi kontrol terhadap apapun yang dilakukan masyarakat Indonesia khususnya dalam hal kebebasan berekspresi. Pada saat itu keadaan belum cukup kondusif bagi pemerintah untuk menerima kritik, peringatan sering diterima oleh wartawan sehingga wartawan sendiri yang harus mengontrol diri mereka sendiri.²³

Gatra lebih menonjolkan sejarah PKI itu sendiri. Artinya bagaimana sejarah PKI yang memberontak hingga akhirnya menimbulkan trauma bagi masyarakat hingga sentimen mengenai isu komunisme itu terjadi di Indonesia. Sikap *Gatra* yang demikian memang disadari oleh Asrori redaktur *Gatra* bahwa sesuai dengan ideologi yang ingin mereka sampaikan kepada publik bahwa berita harus seimbang.²⁴

Moral judgement. *Tempo* menyebutkan bahwa isu PKI untuk menyerang presiden dan pelanggaran HAM. *Tempo* selalu ingin memberitahu kepada publik bahwa fenomena yang telah terjadi adalah pelanggaran HAM. Hal tersebut ditunjukkan oleh *Tempo* dengan memberikan fakta mengenai keterlibatan diluar PKI khususnya TNI AD dalam pemberitaan yang dituliskan. Walaupun tujuan *Tempo* adalah menunjukkan kepada publik mengenai mana yang benar nyatanya *Tempo* menerima kritik keras dari pembaca.²⁵ Namun *Tempo* ingin menegaskan bahwa tindakan tersebut telah melanggar

²² Janet Steele, Wars Within, Jakarta Dian Rakyat 2007. Hal 215-237

²³ Janet Steele, Wars Within, Jakarta Dian Rakyat 2007. Hal 49

²⁴ Wawancara, Asrori S Karni, Jakarta, 22 Desember 2017

²⁵ Wawancara, bagja, Jakarta, 22 Desember 2017

hak asasi manusia, mengingat Tempo berdiri atas dasar demokrasi, hak asasi dan demokrasi.²⁶

Gatra menilai pemberitaan PKI sebagai upaya melemahkan presiden serta mobilisasi politik. *Gatra* juga menyebutkan bahwa isu PKI dinilai untuk melemahkan presiden yang tengah memimpin dengan menyampaikan protes masyarakat mengenai usulan Gus Dur yang dianggap tidak penting karena pada saat itu Gus Dur selalu memberikan kejutan, yang dimaksud kejutan adalah kebijakan Gus Dur dinilai fenomenal dan tak umum. Karena hal tersebut Gus Dur pun dilemahkan oleh berbagai partai politik bahkan dari pihak NU sendiri. Selanjutnya mengenai mobilisasi politik, dimana *Gatra* memberikan frame bahwa dibalik pemutaran film yang dilakukan TNI AD pada era kepresidenan Jokowi mendapat dukungan dari berbagai partai politik bahkan ada partai politik yang menguasai salah satu media yaitu Golkar memberikan ruang untuk menayangkan pada stasiun TVOne. Dalam hal ini *Gatra* tidak memberikan penilaian yang buruk terhadap tindakan Partai Politik dan pihak TNI AD.

Treatment recommendation. Tempo memberikan tawaran solusi bahwa harus dilakukan rekonsiliasi dan pelurusan sejarah. Sesuai dengan dasar berdirinya Tempo yang membela kaum tertindas dan hak asasi manusia, dimana Tempo sejak awal telah memposisikan PKI sebagai korban atas ketidakadilan dari rezim Orde Baru hingga saat ini perlu dibela. Selanjutnya perlunya pelurusan sejarah mengenai peristiwa 65 menjadi argumen yang juga selalu disampaikan Tempo. Tempo memang sangat menunjukkan sensitifitas terhadap rezim Orde Baru mengingat bahwa sejarah yang berkembang adalah bersumber dari Orde Baru demi melanggengkan kekuasaan.

Gatra yang menyebutkan bahwa yang seharusnya dilakukan adalah rekonsiliasi alami dan pemeriksaan ulang sejarah. Rekonsiliasi alami yang dimaksud adalah dengan kerelaan dari setiap pihak bukan memaksa Negara meminta maaf kepada PKI. disini *Gatra* menyampaikan bahwa tidak bersikap membela salah satu pihak. Pemeriksaan ulang sejarah diilih oleh *Gatra* untuk memeriksa bagaimana sejarah telah disampaikan kepada

²⁶ ibid

public. Pemilihan kata “periksa” bukan berarti menyalahkan sejarah yang telah ada tapi mengkonfirmasi ulang.

Argumen Konstruksi Realitas yang Dibangun Tempo dan Gatra.

Tempo mengkonstruksi berita PKI sebagai sebuah pelanggaran HAM yang dilakukan Orde Baru sehingga sikap yang ditunjukkan *Tempo* adalah berpihak pada mantan keluarga PKI dan mantan anggota PKI. Implikasi dari hal tersebut terlihat dari kalimat-kalimat yang dipilih *Tempo* untuk menegaskan bahwa PKI sebagai korban dan beberapa pihak sengaja memanfaatkan berita tersebut untuk kepentingan kelompok. Dalam paradigma konstruktivisme yang mendasari konsep hierarchi of influence menempatkan fakta adalah sesuatu yang bersifat subjektif, ganda bahkan plural.²⁷ Dari konsep tersebut *Tempo* tidak mengacu bahwa kebenaran peristiwa G30S 1965 seperti yang telah dipropagandakan oleh rezim Orde Baru melainkan ada fakta-fakta lain yang perlu diungkap.

Dimulai dari level individu, *Tempo* telah memberikan kualifikasi khusus siapa wartawan yang bekerja pada majalah *Tempo* adalah mereka yang belum pernah memiliki pengalaman bekerja pada media lain, sehingga pengetahuan yang akan dibangun oleh organisasi mengenai bagaimana prinsip lebih mudah menyatukan visi dan misi dari *Tempo*. Hal ini semacam hegemoni yang ditanamkan bagaimana seorang wartawan akan bekerja dan sesuai dengan jurnalistik versi *Tempo*. Sesuai dengan paradigma konstruktivisme posisi wartawan adalah sebagai agen konstruksi dan mendefinisikan suatu fenomena yang telah ditentukan sisi mana yang akan lebih ditonjolkan kepada publik, dalam berita PKI *Tempo* menonjolkan sisi bahwa PKI adalah korban yang harus dibantu untuk memperoleh hak nya. Sesuai dengan rutinitas *Tempo* yang selalu mengadakan rapat untuk menentukan angel berita dan tentunya keputusan tersebut sesuai dengan ideologi yang dibangun *Tempo*. Nampaknya faktor ekstramedia kurang begitu mempengaruhi berita yang dihasilkan *Tempo* melihat Ideologi dan rutinitas serta organisasi media lebih berpengaruh membentuk jiwa wartawan *Tempo* yang sesuai dengan jurnalistik versi *Tempo*.

²⁷ N Krisdinanto, KOMUNIKATIF Jurnal Ilmiah Komunikasi /Volume 3 /Nomor 01 Juli 2014

Gatra lebih sering mengkonstruksikan PKI sebagai sesuatu yang memang sensitif bagi masyarakat sehingga membuat *Gatra* lebih berhati-hati dalam menuliskan berita tersebut. Pandangan *Gatra* mengenai berita PKI adalah peristiwa yang menyebabkan traumatik pada masyarakat yang begitu kontroversial jika tidak melegakan dari sebagian pihak dalam memberikan argumen. *Gatra* berada ditengah-tengah permasalahan yaitu hanya memaparkan fakta. Sama halnya dengan *Tempo*, sikap *Gatra* juga dipengaruhi oleh faktor individu, rutinitas media, organisasi, ekstramedia dan ideologi media.

Wartawan *Gatra* sebagai agen pencari informasi dan mendeskripsikan realitas lebih banyak dipengaruhi oleh rutinitas media. Hal tersebut disampaikan oleh Aditya, wartawan *Gatra* bahwa proses pencarian informasi berfokus pada angel yang telah ditentukan dan disepakati oleh forum. Hal itu juga dikonfirmasi oleh Asrori Redaktur *Gatra* yang membenarkan bahwa seluruh pemilihan angel merupakan keputusan bersama dan hal tersebut harus dijalankan oleh seluruh wartawan. Kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh organisasi media dimana keputusan tetap berada pada posisi tertinggi berada pada editor yaitu redaktur pelaksana *Gatra*. Mengenai ketidakberpihakan *Gatra* dalam pemberitaan PKI juga dipengaruhi oleh faktor ekstra media dalam hal ini adalah beberapa pihak diluar media yang mempengaruhi keberlangsungan media tersebut. Artinya suatu media tidak akan mengambil sudut pandang berita yang dapat menjatuhkan pemasok modal. Hal ini mengingatkan pada sejarah *Gatra* yang begitu dekat dengan rezim Orde Baru. Tentu saja *Gatra* menempatkan posisi Angkatan Darat sebagai pihak yang menjaga keamanan Indonesia bukan sebagai pendukung Orde Baru yang melanggar hak para mantan keluarga PKI dan mantan anggota PKI. Jika diperhatikan pengaruh yang paling tampak pada *Gatra* berasal dari ekstramedia sehingga mempengaruhi ideologi dan tujuan keberlanjutan *Gatra*.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa pemilihan bahasa yang tentu juga memiliki konotasi berbeda walaupun terlintas hampir sama memiliki kecenderungan yang berbeda. Seperti pernyataan "*pelurusan sejarah*" yang disebut-sebut *Tempo*, mengindikasikan bahwa selama ini sejarah yang ada di Indonesia salah atau dibelokkan oleh kepentingan tertentu. Sedangkan *Gatra* memilih menggunakan bahasa "*pemeriksaan ulang sejarah*" dalam hal ini *Gatra* masih menganggap sejarah Indonesia harus dikonfirmasi ulang namun bukan berarti sejarah yang sudah menjadi

kepercayaan masyarakat merupakan sejarah yang salah. Hal tersebut merupakan konstruksi yang dibangun media karena faktor-faktor yang telah dijelaskan melalui konsep hierarchy of influence dari Shoemaker and Reese.

E. Penutup

Terdapat beberapa aspek yang ditonjolkan *Tempo* mengenai pemberitaan PKI era kepresidenan Gus Dur dan era kepresidenan Jokowi. Penonjolan berita yang disampaikan *Tempo* cenderung karena dasar ideologi *Tempo* yang memihak pada pelanggaran hak asasi manusia, pengalaman sejarah awal berdiri *Tempo*, hingga para pendiri *Tempo* Goenawan Mohamad dan kawan-kawan. Sejarah telah membawa *Tempo* memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap rezim Orde baru sehingga dalam hal ini *Tempo* memilih dan mengambil sikap untuk memosisikan PKI sebagai korban yang harus mendapatkan haknya. Terdapat empat penonjolan yang telah peneliti rangkum diantaranya adalah Pelarangan ideologi komunisme tidak relevan dengan zaman, kemunculan isu komunisme digunakan untuk menyerang presiden, Orde Baru dan TNI AD aktor yang menyebabkan masyarakat takut dengan isu PKI, pelanggaran ham dan perlunya rekonsiliasi untuk pelurusan sejarah. Konstruksi tersebut didominasi oleh pengaruh ideologi dan organisasi.

Sama halnya dengan *Tempo*, pemberitaan *Gatra* juga dipengaruhi oleh latar belakang berdirinya *Gatra* serta ideologi yang mempengaruhi. Mengingat latar belakang *Gatra* merupakan media yang didirikan untuk mengganti *Tempo* yang tengah dibredel oleh Rezim Orde Baru serta anggota yang bergabung di tubuh *Gatra* berasal dari mantan anggota *Tempo* sehingga seringkali *Gatra* dianggap dekat dengan Orde Baru. Sehingga hal tersebut berpengaruh juga terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh *Gatra* terhadap isu PKI di era kepresidenan Gus Dur dan era kepresidenan Jokowi. Empat penonjolan yang disampaikan *Gatra* antara lain Pembebasan ideologi komunisme perlu dipertimbangkan karena traumatik sejarah dan tidak sesuai dengan ideologi bangsa, isu komunisme sebagai alat untuk dari melemahkan pemerintah dan mobilisasi politik, TNI AD sebagai pelindung negara dari bahaya komunisme, Rekonsiliasi alami dan pemeriksaan ulang sejarah. Konstruksi tersebut didominasi oleh pengaruh ideologo, ekstramedia dan organisasi.

Keterbatasan dalam penelitian ini ada pada tahap pencarian data yang cenderung memakan waktu yang cukup lama serta pendalaman sejarah, teori serta sumber referensi terkait kedua media khususnya Gatra. Selama ini belum ada buku yang menerbitkan sumber referensi terpercaya mengenai majalah Gatra. Saran untuk penelitian selanjutnya agar menulis pemberitaan yang mengarah pada sejarah lebih mendalam dan detail. Untuk media diharapkan penulisan berita berimbang dan mampu menunjukkan sikap.

DAFTAR USTAKA

Buku

Andy, Tim Penulis Kick. 2011. *Kumpulan Kisah Inspiratif 2*. Yogyakarta: Bentang.

Bungin, Burhan. 2008. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Eryanto. 2002. *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: Lkis.

Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta : Granit.

Harsono, Andreas dkk. (Eds.). 2008. *Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat*. Jakarta: Kepustakaan Gramedia Populer.

Kurnia, Septiawan Santana. 2002. *Jurnalisme Sastra*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sobur, Alex. 2006. *Analisis Teks Media: suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Shoemaker dan Reese. 1996. *Mediating The Message: Theories Of Influence On Mass Media Content*. New York: Longman Publisher.

Steele, Janet. 2007. *Wars Within*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.

Jurnal

Andi Suwirta, 2000. *Mengkritisi Peristiwa G30S 1965: Dominasi Wacana sejarah Orde Baru Dalam Sorotan*, Jurnal Historia: jurnal Pendidikan Sejarah, No.1

Baabe. Aspen Raemanodkk. 2013. "Keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI) Dalam Pemerintahan Hasil Pemilu Pertama 1955-1959" *Jurnal Social Science* Vol , No.3. Universitas Negeri Manado.

Dede Supriyatno dan Adolfo Eko Setyanto, Jurnal Universitas Sebelas Maret. "Representasi Citra militer Dalam Pemberitaan Majalah Tempo (Analisis Wacana Citra Militer Pada Pemberitaan Majalah Tempo Liputan Khusus Pengakuan Algojo 1965

Edisi 1-7 Oktober 2012)” Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Jurnal International Memory studies dari ETD UGM, etd.repository.ugm.ac.id diakses pada 15 Mei 2017.

N Krisdinanto, KOMUNIKATIF Jurnal Ilmiah Komunikasi /Volume 3 /Nomor 01 Juli 2014

Setyanto, Adolfo EkodanDede Supriyatno. JurnalUniversitasSebelasMaret. “*Representasi Citra militerDalamPemberitaanMajalah Tempo (Analisis Wacana Citra Militer Pada Pemberitaan Majalah Tempo Liputan Khusus Pengakuan Algojo 1965 Edisi 1-7 Oktober 2012).*” Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politi kUniversitas Sebelas Maret Surakarta.

Artikel

Mahpuddin. 2009. *Ideologi Media Massa dan Pengembangan Civil*. Jurnal Academica Untad. Vol 1, No 2. <http://download.portalgaruda.org/article.php> 191. (Akses pada 1 Juni 2017. Pukul 15.30 WIB).

Nurul Khomariah, Roekhan, dkk , Penggunaan Unsur Fiksi Dalam Buku Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan mendalam dan Memikat, jurnal-online.um.ac.id (Diakses 28 Mei 2018)

Wawancara

Aditya Kirana. WartawanGatra, Jakarta. 22 Desember 2017

Abdul Manan. Wartawan Tempo. Jakarta. 22 Desember 2017

Asrori S Karni. RedakturPelaksanaGatra. Jakarta. 22 Desember 2017.

Bagja Hidayat. RedakturPelaksana Tempo. Jakarta. 22 Desember 2017

Identitas Penulis

A. Identitas Penulis Pertama (Mahasiswa)

Nama : Meigitaria Sanita
NIM :
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 14 Mei 1995
Program Studi : Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi,
Universitas Islam Indonesia
Konsentrasi Studi : Jurnalisme dan Penyiaran
Alamat, Kontak : Ds. Sembung RT/RW 02/01 Kec. Parengan Kab. Tuban
Jawa Timur - 085234150162
Karya Tulis Ilmiah : -

B. Identitas Penulis Kedua (Dosen Pembimbing Skripsi)

Nama : Puji Rianto, S.IP.,M.A
NIDN : 0503057601
Tempat, Tanggal Lahir : -
Jabatan Akademik : Dosen Tetap
Alamat, Kontak : 081326644427
Karya Tulis Ilmiah : -